

PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) OLEH PEMILIK KEGIATAN USAHA DI PASAR TRADISIONAL SEKADAU

Oleh:
PETRUS SUPRAYOGI
NIM. E42012090

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : petrussuprayogi233@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis cara pengawasan Pemerintah Khususnya Bidang Dampak dan Petaan Hukum Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau terhadap pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Oleh Pemilik Kegiatan Usaha di Pasar Tradisional Sekadau dan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan menganalisa data yang ditemukan dilapangan berupa kata-kata dan gambar. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (*pre survey*), membuat rencana penelitian (usulan penelitian), pengambilan data primer dan data sekunder dengan cara wawancara (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisis data serta pembuatan laporan penelitian (Skripsi). Lokasi penelitian berada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, dokumentasi dan diuji keabsahannya dengan proses *triangulasi* sumber. Simpulan penelitian ini bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah dijalankan. Namun dalam pelaksanaannya terungkap beberapa faktor yang menghambat dan membuat pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya sikap komperatif dari pemilik usaha dan/atau kegiatan pasar yang tidak mau memberikan informasi yang akurat kepada petugas yang melakukan peninjauan, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan kurangnya dana untuk mendukung proses pelaksanaan pengawasan.

Kata-kata Kunci : Cara Pengawasan, Pemerintah, Dan Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

ENVIRONMENTAL OVERSIGHT OF THE IMPLEMENTATION OF LETTER INTENTION OF MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL MONITORING (SPPL) BY THE OWNER OF THE BUSSINESS ACTIVITIES IN SEKADAU TRADITIONAL MARKETS

Abstract

Thesis Writing is intended to describe and analyze how the supervision of the Government Particularly Sector Impacts and Compliance Environmental Law Environmental Agency Sekadau to the implementation of Statement of Capability Management and Environmental Monitoring (SPPL) By Own Operations in Traditional Markets Sekadau and the factors that cause not optimal surveillance. This study uses qualitative descriptive study is to analyze the data found in the field in the form of words and images. This research was conducted by several stages, beginning with a preliminary investigation (*pre-survey*), making the research plan (research proposal), primary data and secondary data in a way very early post (interview), followed by analyzing the data and preparing the research report (thesis). The location of research is at the Environment Agency Sekadau. The data collection technique is by interview, documentation and tested its validity with the process of triangulation.

The conclusions of this study that the general supervision of the Environment Agency on the Statement of Capability Management and Environmental Monitoring (SPPL) has been executed. However, in practice revealed several factors that hamper and make the implementation of surveillance are not optimal. Factors such inhibitors include comparative attitude of the business owner and/or market activity did not want to give accurate information to the officer who made the observation, power limitations in carrying out the supervision, execution time constraints, and lack of funds to support the implementation process supervision.

Keywords: How To Control The Government, And The Implementation Of Statement Of Capability Management And Environmental Monitoring (SPPL)

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ibukota Kabupaten Sekadau terletak di Kecamatan Sekadau Hilir, yaitu disepanjang tepian Sungai Sekadau dan Sungai Menterap. Sungai Sekadau dan Sungai Menterap merupakan sungai terbesar di Kabupaten Sekadau. Manfaat Sungai Sekadau sangat dirasakan oleh masyarakat Sekadau. Sebagian besar kegiatan dilakukan di Sungai Sekadau, seperti akses untuk perdagangan, penyeberangan, kegiatan hiburan, kegiatan festival budaya, dan lain sebagainya. Manfaat yang tak kalah penting adalah sebagai sumber air bagi masyarakat Sekadau. Sungai Sekadau yang merupakan kebanggaan masyarakat Kabupaten Sekadau saat ini mulai tercemar oleh sampah dan limbah-limbah pasar, yaitu Pasar Tradisional Sekadau yang berlokasi di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Pasar Tradisional ini terletak berdampingan dengan pemukiman warga,

sehingga sampah/limbah usaha dari kegiatan pasar ini mencemari lingkungan pemukiman warga dan aliran sungai sekadau. Namun, hingga saat ini juga air dari Sungai Sekadau masih dimanfaatkan warga untuk mandi, mencuci, dan bahkan masih ada untuk diminum. Atas kondisi tersebut masyarakat yang berada di tepi aliran sungai sekadau mulai merasa resah dengan keadaan tersebut.

Menanggapi permasalahan tersebut dan demi mempertahankan kualitas hidup dan kualitas lingkungan masyarakat Kabupaten Sekadau khususnya yang tinggal di sepanjang aliran sungai sekadau atau disekitar pasar tradisional sekadau, pemerintah harus mengambil tindakan atas permasalahan tersebut. Dalam permasalahan ini dibutuhkan fungsi pemerintahan sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha pasar tradisional ini perlu untuk diteliti. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil judul

penelitian : Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Oleh Pemilik Kegiatan Usaha Di Pasar Tradisional Sekadau.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dalam penelitian ini harus terarah dengan jelas. Oleh karena itu, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana cara Pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Oleh Pemilik Kegiatan Usaha di Pasar Tradisional Sekadau?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sasaran yang akan dilakukan dalam penelitian. Rumusan masalah penelitian yang telah disusun merupakan tujuan dari penelitian ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa cara pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan SPPL oleh pemilik kegiatan usaha di Pasar Tradisional Sekadau.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya pada bidang teknik pengawasan. Pada penelitian ini, teknik pengawasan tersebut berkaitan dengan pengawasan badan lingkungan hidup terhadap pelaksanaan SPPL oleh pemilik kegiatan usaha di Pasar tradisional Sekadau yang dilaksanakan oleh Bidang Dampak dan Petaan Hukum Lingkungan Hidup.

4.1.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL oleh pemilik kegiatan usaha di pasar tradisional sekadau.
2. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran mahasiswa bagi peningkatan taraf pendidikan di Kalimantan Barat.

B. TEORI DAN METODOLOGI

2.1 Teori

Pengawasan haruslah dilaksanakan dan didasari dengan teknik pengawasan yang nantinya dapat dijadikan alat dalam melaksanakan pengawasan Teknik pengawasan menurut Siagian (2014:112) adalah sebagai berikut :

1. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung atau pengawasan langsung adalah megawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan. Dalam inspeksi langsung ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu:

a. *On the spot observation*

On the spot observation merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara para petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengamatan langsung sebagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “on the spot” bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi dengan demikian manajemen dapat segera “meluruskan” tindakan pera

pelaksana apabila diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang tata cara bekerja yang benar. Disamping itu dengan pengamatan langsung, para bawahan akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya sehingga dalam diri bawahan tidak timbul kesan bahwa pemimpin “jauh” dan “tidak terjangkau” oleh para bawahan tersebut.

b. *On the spot report*

On the spot report merupakan pengawasan langsung dengan cara laporan ditempat. Manajemen meminta langsung laporan dari para petugas operasional terkait penyelenggaraan dan penyelesaian tugasnya. Teknik ini berfungsi meminimalisir kecurangan dalam laporan dari bawahan pada atasan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ini juga disebut pengawasan dari jarak jauh artinya, pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan pada atasan. Laporan tersebut dapat berupa:

1. Lisan

Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta – fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Dengan cara ini kedua pihak aktif, bawahan memberikan laporan lisan

tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta – fakta yang diperlukannya. Pengawasan seperti ini dapat mempererat hubungan pejabat, karena adanya kotak wawancara antara mereka.

2. Tertulis

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilakukan, sesuai dengan instruksi dan tugas – tugas yang diberikan bawahan pada atasan pimpinan menilai sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan atau standar kegiatan yang ditetapkan.

Pengawasan tersebut berfungsi menentukan apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Manajemen itu sendiri berdasarkan uraian Terry (dalam Handyanigrat, 1996:25) bahwa proses dari manajemen yang lebih dikenal dengan akronim POAC, terdiri atas: Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan pelaksanaan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*). Pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan kenyataan yang ada dengan harapan yang dicita-citakan.

2.2 Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Oleh Pemilik Kegiatan Usaha di Pasar Tradisional Sekadau ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa data secara kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis teknik pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan mengulas tentang beberapa temuan data dan informasi berdasarkan hasil wawancara dengan para informan serta dari dokumen-dokumen yang menjadi dasar atau landasan hukum serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL serta apa yang menyebabkan pengawasan tersebut belum optimal.

3.1 Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah megawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan. Dalam inspeksi langsung ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu:

1. *On the Spot Observation* (Inspeksi Langsung)

Pengawasan langsung dilaksanakan oleh tim pengawas pelaksanaan SPPL belum optimal dimana sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk melaksanakan pengawasan. Dengan tidak diberlakukannya sanksi, kekurangan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana seperti alat transportasi membuat pegawai pengawas peternakan sulit dalam melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan SPPL oleh pemilik kegiatan usaha pasar. Dampak yang diterima Kabupaten Sekadau akhirnya adalah proses pengawasan langsung dengan *On the Spot Observation* belum dapat berjalan secara optimal dan menimbulkan dampak kepada lingkungan serta ketidak patuhan pemilik kegiatan usaha di pasar tradisional sekadau.

2. *On the Spot Report* (Laporan ditempat)

Pelaksanaan pengawasan langsung dengan teknik *On the Spot Report* dilakukan tim pengawas SPPL di Pasar Tradisional Sekadau. Tetapi, kekurangan pegawai pengawas menjadikan pengawasan tersebut belum optimal. Peneliti juga melihaht ada dampak yang dirasakn oleh masyarakat akibat tidak terkelolanya limbah kegiatan usaha di pasar tradisional sekadau. Ini menunjukkan bahwa tim pengawas pelaksanaan SPPL di pasar tradisional sekadau masih belum berhasil dalam mengawasi pelaksanaan SPPL di Pasar Tradisional Sekadau.. Peneliti juga memperoleh sebuah pernyataan dari hasil wawancara bahwa benar tim pengawas pelaksanaan SPPL telah melakukan pengawasan langsung dengan teknik *On the Spot Observation* dan *On the Spot Report*. Tetapi, pengawasan tersebut belum optimal dikarenakan beberapa faktor seperti belum diberlakukannya sanksi, tim pengawas SPPL yang minim serta sarana dan prasarana belum memadai. Sehingga hal ini berdampak pada belum terlaksananya ketentuan

pelaksanaan SPPL sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2 Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Dampak dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup menjadi tidak optimal bukan dikarenakan teknik pengawasan tersebut tidak dilaksanakan melainkan, terdapat faktor-faktor yang menghambat pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL oleh pemilik kegiatan usaha menjadi tidak optimal. Semua cara dalam teknik pengawasan telah dilaksanakan baik secara pengawasan langsung yaitu dengan teknik *On the Spot Observation* dan teknik *On the Spot Report* maupun dengan cara pengawasan tidak langsung. Tetapi, pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal dikarenakan faktor-faktor penghambat diantaranya adalah tidak diberlakukannya sanksi administratif, kurangnya sarana dan prasarana, jumlah pegawai pengawas peternakan yang kurang memadai, dan dana sosialisasi yang minim. Beberapa faktor tersebut membuat pengawasan langsung dan tidak langsung yang diterapkan petugas pengawas pelaksanaan SPPL

menjadi tidak terlaksana secara optimal. Pengawasan yang tidak optimal berdampak pada banyak bidang kehidupan Baik itu pencemaran lingkungan maupun menimbulkan polusi yang dapat menyebabkan timbulnya beberapa macam penyakit bagi hewan, bahkan bagi manusia. Dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan SPPL di pasar tradisional sekadau, lemahnya kesadaran pemilik kegiatan usaha untuk melaksanakan wajib lapor pelaksanaan SPPL, dan pengetahuan pemilik kegiatan usaha di pasar tradisional sekadau yang lemah tentang izin lingkungan bagi setiap pemilik kegiatan usaha di pasar tradisional sekadau bukan karena petugas pengawas pelaksanaan SPPL tidak melaksanakan teknik pengawasan. Pencapaian hasil dalam sebuah pengawasan adalah ketika perencanaan dan penyelenggaraan selaras dengan hasil yang diharapkan. Ukuran sebuah pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL tersebut dikatakan optimal apabila ketentuan pelaksanaan SPPL telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap

badan usaha yang ada di Kabupaten Sekadau.

Teknik pengawasan menurut siagian yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini menimbulkan sebuah fakta baru bahwa dalam melaksanakan sebuah pengawasan kita tidak hanya harus mengetahui teknik pengawasan atau hanya melakukan teknik pengawasan tersebut akan tetapi, kita harus mengetahui dan memahami betul faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ataupun menghambat pelaksanaan teknik pengawasan tersebut. Apabila telah memahami faktor-faktor penghambat tersebut, maka kita akan mengetahui langkah-langkah pengoptimalan sebuah teknik pengawasan yang nantinya akan menghasilkan pengawasan yang optimal seperti apa yang kita harapkan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang ada dan dari hasil penelitian serta uraian pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada proses pengawasan langsung oleh petugas pengawas dalam

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL oleh pemilik kegiatan usaha di pasar tradisional sekadau dengan teknik *On the Spot Observation* memang benar telah dilaksanakan. Namun, pengawasan tersebut menjadi tidak optimal dikarenakan tidak adanya dukungan oleh sarana dan prasarana yang memadai serta belum diberlakukannya sanksi administratif. Pelaksanaan pengawasan langsung secara *On the Spot Report* juga telah diterapkan oleh petugas pengawas SPPL dengan melakukan pengecekan dokumen lingkungan pada saat pemantauan dilapangan. Akan tetapi dalam melaksanakannya petugas pengawas mengalami kekurangan aparatur untuk melakukan pengawasan terhadap SPPL dalam melaksanakan pemeriksaan dokumen lingkungan, sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal.

2. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan oleh petugas pengawas SPPL dengan menerapkan wajib lapor pelaksanaan SPPL. Hasil laporan yang disampaikan oleh pemilik kegiatan usaha kepada Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup akan menjadi bukti kerjasama antara

pemilik kegiatan usaha dengan Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup, serta data yang diberikan dapat menjadi dasar terhadap pembaruan data yang dimiliki oleh Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup terhadap setiap perubahan baik secara fisik maupun jumlah pemilik kegiatan usaha di Pasar Tradisional Sekadau.

E. IMPLIKASI

Implikasi atau dampak dari penelitian yang telah peneliti laksanakan di bagi menjadi 2 (dua), yaitu dampak teoritis dan dampak praktis. Dampak terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis terutama dalam Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan SPPL di Pasar Tradisional Sekadau. Dampak bagi ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis adalah sebagai bahan kajian tambahan dalam Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup.

Sedangkan bagi SKPD, digunakan sebagai referensi dalam melakukan pengawasan dengan menggunakan teknik yang tepat. Peneliti berharap kedepannya pelaksanaan pengawasan

terhadap SPPL di pasar tradisional sekadau dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah diterapkan. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL ini, akan ada banyak lagi penelitian yang sama sehingga dapat menjadi kajian referensi dan bahan evaluasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap SPPL.

Implikasi selanjutnya adalah dampak praktis bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Dari hasil penelitian yang peneliti rasakan di lapangan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dibeban tugaskan dengan berbagai hal yang bersifat administrasi, sedangkan kebutuhan petugas pengawas terbatas, dana operasional tidak tetap serta pelaksanaan sanksi belum dilakukan secara optimal.

Peneliti berharap Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup, dapat memberikan solusi bagi masalah ini sehingga pengawasan akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, besar harapan peneliti untuk mempertimbangkan dan menjadikan

bahan masukan implikasi dari hasil penelitian ini. Kemudian peneliti juga berharap lebih baik lagi kinerja aparatur dan kerja samanya sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

F. SARAN

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau maupun Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka peneliti menyampaikan saran-saran sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian. Berikut adalah saran-saran yang disampaikan :

- a. Dalam penyelenggaraan pengawasan langsung perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, seperti penambahan alat transportasi roda empat sehingga dengan adanya penambahan ini mempermudah petugas pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL oleh pemilik kegiatan usaha di Pasar Tradisional Sekadau. Selain itu, agar manajemen

waktu, tenaga dan biaya guna pengawasan supaya dapat mempermudah bidang Dampak dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan.

- b. Harus adanya sikap tegas dari Badan Lingkungan Hidup dalam menegakkan sanksi administratif, karena hal ini memberikan dampak yang besar dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan SPPL di Pasar Tradisional Sekadau. Sanksi dapat diberlakukan dengan pemberhentian sementara tempat usaha atau pencabutan izin lingkungan.
- c. Agar pelaksanaan pengawasan SPPL dapat berjalan rutin maka perlu ditinjau akan kebutuhan pegawai pengawas bidang Dampak dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup. Ini karena petugas pengawas SPPL merupakan pelaksana teknis terkait pelaksanaan SPPL di Pasar Tradisional Sekadau. Jumlah pegawai pengawas haruslah sebanding dengan beban kerja dan jumlah kegiatan usaha yang diawasi
- d. Pelaksanaan sebuah kegiatan tentu perlu adanya dana. Fakta

dimana belum adanya dana dalam pelaksanaan pengawasan SPPL di Pasar Tradisional Sekadau akan melemahkan pelaksanaan pengawasan. Dengan keadaan ini Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup perlu melakukan penganggaran khusus terhadap pengawasan pelaksanaan SPPL di Pasar tradisional Sekadau yang tidak boleh diganggu gugat oleh kegiatan lainnya.

- e. Pelaksanaan pengawasan SPPL di Pasar Tradisional ini juga dapat mengikut sertakan instansi lain yang terkait dengan izin usaha . Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil pengawasan yang lebih efektif serta tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
- f. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah hasil kegiatan usaha Badan Lingkungan Hidup dapat melakukan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau untuk membantu

mengatasi tumpukan sampah oleh kegiatan usaha pasar.

4.1 Keterbatasan penelitian

Selama melaksanakan penelitian, peneliti mengalami beberapa kendala dan keterbatasan dalam penelitian, berikut adalah keterbatasan selama penulis melaksanakan penelitian.

- a. Sulitnya memperoleh data dalam pelaksanaan wawancara, dikarenakan subjek penelitian atau informan yang ingin diwawancarai sulit untuk ditemui karena banyaknya kesibukan
- b. Sulitnya mendapatkan dokumen-dokumen pendukung tentang pelaksanaan pengawasan SPPL di Pasar Tradisional Sekadau, dikarenakan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL ini masih dalam bentuk formalitas dan belum menjadi prioritas.
- c. Sulitnya mendapatkan dokumen-dokumen pendukung tentang segala bentuk data yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL di Pasar Tradisional Sekadau, mengharuskan peneliti mencari

informasi tentang pengawasan tersebut dengan metode wawancara yang lebih dominan dibandingkan dengan pemenuhan data skunder. Sehingga pemenuhan data primer lebih fokus peneliti lakukan.

- d. Keterbatasan waktu penelitian yang dilaksanakan peneliti mengakibatkan peneliti kesulitan memperoleh jawaban yang lebih dalam berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL di Pasar Tradisional Sekadau.

G. REFERSNSI

A. Buku-buku

Afifudin. 2013. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabet.

Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.

Manullang, M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Medan: Gadjah Mada University Press.

Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Siagian, Sondang. 2008. *Pengantar Manajemen, edisi pertama*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.

Tim Penyusun. 2014. *Jumlah Volume Sampah Kabupaten Sekadau Tahun 2013-2014*. Sekadau. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.

Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak: PRODI IP FISIP UNTAN.

Wihudjen, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Skripsi

Tae, Yuliana. 2015. *Pengawasan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontiaanak Terhadap Pengelolaan Sampah*. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Kusumadewi, V. Rindya. 2011. *Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri*. Skripsi. Karanganyar: Prodi Ilmu Pemerintahan.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Amdal.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

D. Lain-lain

Riadi, Muchlisin. 2016.
<http://www.kajianpustaka.com/2015/02/pe-ngertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>.
Dikutip dari Internet.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAIH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Petrus Suprayogi
NIM / Periode Lulus : E42012090 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : petrussuprayogi233@gmail.com / 085753822972

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN SURAT PERNYATAAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) OLEH PEMILIK KEGIATAN
USAHA DI PASAR TRADISIONAL SEKADAU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 27 Januari 2017

(Petrus Suprayogi)